

**DEMOKRASI DALAM ISLAM  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD NATSIR  
DAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**STATEASEP ZAELANI MNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**NIM: 9936 3735**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. MUHAMMAD NUR, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Asep Zaelani MN

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Asep Zaelani MN

NIM : 9936 3735

Judul : "*DEMOKRASI DALAM ISLAM*

*(Studi Komparatif antara Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri)"*,

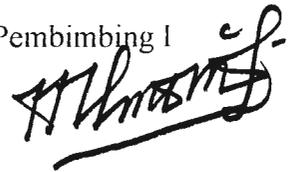
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Muharam 1425 H  
12 Maret 2004 M

Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP: 150 182 698

**H. M. Nur, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Asep Zaelani MN

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Asep Zaelani MN

NIM : 9936 3735

Judul : "*DEMOKRASI DALAM ISLAM  
(Studi Komparatif antara Muhammad Natsir dan Muhammad Abid  
al-Jabiri)*",

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 23 Muharam 1425 H  
15 Maret 2004 M

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 282 522

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**DEMOKRASI DALAM ISLAM  
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MUHAMMAD NATSIR DAN  
MUHAMMAD ABID AL-JABIRI)**

Yang disusun oleh:

Asep Zaelani MN  
NIM: 9936 3735

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Kamis, 25 Maret 2004 M / 4 Shafar 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Shafar 1425 H  
31 Maret 2004 M

DEKAN



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Budi Ruhmatudin, SH., M. Hum.  
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 282 522

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.  
NIP: 150 182 698

Penguji I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA  
NIP: 150 282 522

Penguji II

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP: 150 289 435

## MOTTO



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون .

*Nuun, demi kalam dan segala yang mereka tulis  
Dengan nikmat Tuhanmu kamu bukanlah seorang yang lemah akal*

*(Al-Qalam (68): 1-2)*

\*\*\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:  
Ayahanda (alm.) dan Ibunda,  
Kakak-kakakku,  
Guru-Guruku Yang Dengan Ikhlas Mendidikku  
Teman-teman Kordiska dan Teman-teman Ikamasi*

## ABSTRAK

Kajian pemikiran politik Islam seringkali dihadapkan kepada konsep demokrasi –yang diakui atau tidak- sebagai sistem politik produk Barat. Sebagian pemikir Islam menolak, sebagian menerima dan sebagiannya menerima dengan catatan. Muhammad Natsir adalah pemikir sekaligus politikus Indonesia termasuk yang menerima dengan catatan. Ia lebih memilih menggabungkan konsep demokrasi Barat itu dengan nilai-nilai Islam, sehingga memunculkan konsep *theistic democracy*. Sementara di sisi lain ada Muhammad Abid al-Jabiri yang merasa bahwa demokrasi adalah ‘kebutuhan’ bagi setiap bangsa. Argumen yang dibangunnya bukan karena kesesuaian antara demokrasi dan Islam, tapi lebih karena realitas yang dihadapi oleh bangsa Arab. Namun ia mengakui bahwa Islam harus menjadi ruh bangsa Arab. Natsir dan al-Jabiri adalah sosok nasionalis religius yang berjuang demi tegaknya demokrasi. Namun kenapa mereka berbeda dalam membangun konsep demokrasinya.

Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran Natsir dan al-Jabiri tentang demokrasi, faktor-faktor yang melatar-belakangi, persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut, serta bagaimana tipologi dan pengaruh pemikiran keduanya terhadap pemikiran politik Islam Indonesia.

Dikarenakan penelitian ini merupakan kajian sejarah pemikiran, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Di samping itu, pendekatan hermeneutik juga mewarnai penelitian ini. Hermeneutik sebagai suatu metode diartikan sebagai cara menafsirkan simbol yang berupa teks atau benda konkret untuk dicari arti dan maknanya.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa Natsir menganut sistem *theistic democracy*, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan al-Jabiri memandang konsep demokrasi sebagai ditentukan oleh dua otoritas yang sepenuhnya berbeda, yakni otoritas tradisi dan otoritas renaissans Eropa. Pemikirannya ini dipengaruhi oleh faktor ~~keluarga~~, pendidikan, guru-guru, aktivitas, kondisi sosio politik, kondisi ekonomi, dan metode pendekatan yang digunakan. Natsir menggunakan metode rekonstruksi sedangkan al-Jabiri menggunakan metode dekonstruksi. Keduanya termasuk dalam kategori pemikir tipologi reformistik, yaitu yang meyakini bahwa *turâs* dan modernitas kedua-duanya adalah baik. Karenanya berusaha mengharmonisasikan *turâs* dan modernitas dengan tidak menyalahi akal sehat dan standar rasional. Adapun pengaruh pemikirannya, yaitu: pemikiran Natsir lebih berkembang di lingkungan kaum modernis Islam, sementara pemikiran al-Jabiri lebih sering dibahas dalam lingkungan kaum muda Nahdlatul Ulama. Akan tetapi perbedaan pengaruh pemikiran ini kurang relevan dalam dunia akademisi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الذي هدانا لهذا بقصص الغابرين، وجعلها عبرة للتابعين إلى يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت حياته مملوءة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar! Itulah ungkapan yang dapat saya kemukakan ketika telah berhasil menyelesaikan tugas akhir kesarjanaan ini setelah menjalani proses yang cukup panjang dan melelahkan, sehingga dengan kesucian dan keagungan-Nya lah saya dapat memuji-Nya. Muhammad SAW sebagai figur historis yang tidak tertandingi merupakan sosok yang pantas dijadikan teladan (*uswah*) karena telah berjasa besar dalam melakukan revolusi kemanusiaan di muka bumi ini, sehingga di sini saya ingin mengungkapkan rasa *salute* (salawat dan salam) yang terdalem atas berbagai aspek revolusioner baik paradigma berpikir maupun tuntunan moralitas Qur'ani yang diwariskannya kepada umat manusia.

Cukup bangga rasanya ketika saya telah menyelesaikan proses penelitian kesarjanaan dan penyusunan skripsi ini, karena dengan media ini saya telah banyak belajar, berpikir dan berimajinasi dalam mengarungi suatu medan pertempuran intelektualitas yang cukup menantang sehingga dapat mencari dan menemukan identitas diri sebagai seorang manusia yang dianugerahi akal pikiran dan hati nurani. Dengan ini saya semakin sadar akan berbagai kelemahan, kebodohan dan

keterbatasan yang saya miliki, kemudian mendorong saya untuk terus berbenah diri untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih bermakna. Dalam skripsi ini, saya berusaha mencurahkan segenap kemampuan dalam hal pemikiran, kreativitas dan ketelitian untuk memenuhi kebutuhan kuriositas (rasa ingin tahu) saya atas problematika kajian Islam dan politik, sehingga skripsi ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban akademik (*scholar duty*), namun lebih pada pembuatan suatu karya yang mana hal ini merupakan karya perdana saya di bidang intelektualitas.

Namun demikian, proses yang panjang dan mengasyikkan ini yang bermetamorfosa menjadi sebuah karya ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, sehingga suatu kemestian bagi saya untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Drs. H.A. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah; Drs. Abdul Halim, MA dan Moh. Agus Nadjib, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. A. Malik Madaniy, MA -yang kedua kalinya- selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I, dan H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penyusun mengucapkan terima-kasih pula pada pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga, perpustakaan

Yayasan Hatta, Perpustakaan St. Ignatius dan Perpustakaan LKiS, yang semuanya ada di Yogyakarta; serta kepada Perpustakaan Nasional Pusat Jakarta.

Kemudian ungkapan terima kasih ini saya tujukan kepada teman-teman Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA), yaitu Trisno, Agus, Wasid, Zainul, Zaky, Hayid, Fira, Roni, Naili, Diah, Nurul, Navi dan seluruh anggota Kordiska yang tak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, yang mengajak saya untuk bertualang dalam belantara pemikiran dan mengajarkan apa arti menjadi “manusia”. Terima kasih pula saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI)-Yogyakarta; yaitu, Hakim, Jaka, Jamal, Yani, Rodiah, Ade Ismail, Ali, Pupung, Iyong, Ina, Oyo, Abuy, Dewi, Dwi dan semua warga Ikamasi yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah sama-sama mulai mendayung perahu perjuangan demi kemajuan Bekasi dan bangsa ini. Tak lupa kepada teman-teman kos Jl. Ambarukmo 186, yaitu Zuhri, Santo, Cahya, Aip, Syafe’, Andi dan Ma’nun yang telah memberikan pengertian dan keceriaannya di tengah-tengah kepenatan saya dalam proses penelitian ini. Kepada teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum-2 angkatan 1999, terutama kepada Yayan, Diar, Jamroni, Zaenal, Hilmi, Tami, Abror, Hana, Lathifah dan semuanya yang tak bisa diwakili oleh ruang kertas ini, saya sampaikan terima kasih atas keceriaan dan kehangatan di kelas kita.

Terlepas dari itu semua tidak ada manusia yang lebih pantas untuk diberi penghargaan dan rasa terima kasih yang terdalam serta paling berjasa dalam proses penelitian dan proses studi saya di Yogyakarta kecuali Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa melantunkan do’a di seluruh waktunya dengan ikhlas dan

khusyu', demi proses pengembaraan intelektual Ananda. Untuk kakak-kakakku: Kang Ujang, Kang Endam, Ceu Ayan, Aa Abid, Aa Asan, A Dede, Teh Cucu, serta Ponakan-ponakanku yang telah banyak mencurahkan perhatian, bantuan dan dorongan pada diri penyusun. Tak lupa juga penyusun mengucapkan terima-kasih kepada semua keluarga yang telah mendukung studi saya di Yogyakarta.

Demikianlah pengantar ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses studi dan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan ma'unah-Nya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Muharam 1425 H  
8 Maret 2004 M

Penyusun



Asep Zaelani MN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/i1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد      ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن      ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وطء      ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب      ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخنون      ditulis *ta'khuzūna*.

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة      ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء      ditulis *an-Nisa'*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II DEMOKRASI DAN WACANA PEMIKIRAN</b>	
<b>POLITIK ISLAM</b> .....	<b>21</b>
A. Demokrasi dan Perkembangannya .....	21

1. Pengertian .....	21
2. Sejarah .....	25
3. Keunggulan dan Kelemahan .....	32 ✓
<b>B. Sistem Politik Islam .....</b>	<b>36</b>
1. Nabi dan Negara Madinah .....	37
2. Khilafah: Samakah dengan Demokrasi? .....	41
<b>C. Respon Intelektual Muslim terhadap Demokrasi .....</b>	<b>47</b>

### **BAB III DEMOKRASI MENURUT MUHAMMAD NATSIR DAN**

#### **MUHAMMAD ABID AL-JABIRI: TINJAUAN HISTORIS**

<b>DAN TEORETIS .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Tinjauan Historis .....</b>	<b>58</b>
1. Muhammad Natsir .....	58
a. Biografi Intelektual .....	58
b. Latar Belakang Pemikiran .....	66
1) Melacak Akar Historis Islam dan Politik di Indonesia ....	66 ✓
2) Natsir dan Masyumi .....	68
2. Muhammad Abid al-Jabiri .....	72
a. Biografi Intelektual .....	72
b. Latar Belakang Pemikiran .....	75
1) Islam dan Politik di Maroko .....	75
2) Kritik Nalar Arab .....	77
<b>B. Tinjauan Teoretis .....</b>	<b>86</b>

1. Struktur Pemikiran Politik Muhammad Natsir .....	86
a. Relasi Islam dan Negara .....	86
b. Konsep Theistic Democracy .....	91
c. Komitmen Natsir terhadap Demokrasi .....	99
2. Struktur Pemikiran Politik Muhammad Abid Al-Jabiri .....	102
a. Agama dan Negara dalam Rujukan Tradisi .....	102
b. Khilafah dan Kekosongan Undang-undang .....	107
c. Membaca Ulang Konsep Demokrasi .....	110
d. Demokrasi dan Realitas Kontemporer Arab .....	118

#### **BAB IV KARAKTERISTIK PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR**

##### **DAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI: SEBUAH**

##### **ANALISIS PERBANDINGAN .....**

A. Pembacaan Sosio Historis .....	125
1. Pendidikan .....	125
2. Guru-guru / Tokoh yang Mempengaruhi .....	128
3. Aktivitas .....	134
4. Kondisi Sosio Politik .....	136
5. Kondisi Ekonomi .....	139
B. Persamaan dan Perbedaan .....	140
1. Substansi Pemikiran .....	140
2. Argumentasi Pemikiran .....	144
3. Metode Pendekatan .....	147

4. Tipologi Pemikiran .....	152
C. Pengaruh Pemikiran .....	154
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>161</b>
A. Kesimpulan .....	161
B. Saran-saran .....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>166</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>i</b>
<b>TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setengah abad terakhir ini demokrasi dalam pengertian modern, telah memperoleh kekuatan hampir universal sebagai ide politik, sebuah inspirasi, dan sebagai sebuah ideologi.<sup>1)</sup> Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai bagian dari modernitas merupakan sistem perpolitikan yang diidealkan oleh setiap penduduk negeri di seluruh belahan dunia. Modernitas ini direspon berbeda oleh setiap negara Muslim di dunia. Paling tidak, Ada dua kecenderungan besar (*mainstream*) sikap di antara cendekiawan Muslim dalam melihat modernitas, yaitu pertama, yang menentang mentah-mentah (disebut fundametalis) dan kedua, yang menerima mentah-mentah tanpa pertimbangan tradisi (disebut apologetis).<sup>2)</sup> Sikap tersebut - secara jelas - telah ditunjukkan oleh beberapa belahan negara Muslim seperti Iran, Pakistan, dan Saudi Arabia yang megklaim sebagai negara Islam. Sementara di sisi lain ada Mesir dan Turki yang telah berubah menjadi negara sekuler.

Turki menjadi negara sekuler setelah keruntuhan dinasti Ottoman. Sekularisasi yang terjadi di Turki dimotori oleh Mustafa Kemal dengan melakukan

---

<sup>1)</sup> Franz Magnis Suseno, "Demokrasi Tantangan Universal", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 122.

<sup>2)</sup> Tentu kedua ekstrimitas ini tidak cukup artikulatif. Menentang modernitas sama sekali bukan ciri Islam, yang sejak awal pertumbuhannya sudah menampakkan kesiapannya dalam menyongsong kemodernan. Menerima modernitas dengan menafikan tradisi akan membuat Islam tercerabut dari akarnya. Barangkali posisi yang lebih tepat adalah *al-muhâfazah 'ala al-qadim as-sâlih wa al-akhzu bi al-jadid al-aslah*. Lihat Muhammad Nur, "Islam Berbicara tentang Cita-cita Politik Indonesia Baru", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No.I, (2002), hlm. 110.

perubahan radikal (*revolusi*) terhadap negaranya yang meliputi bentuk negara, sistem pemerintahan, politik, budaya sampai kepada bahasa yang digunakan.<sup>3)</sup> Demikian pula halnya dengan Mesir yang telah menjadi negara liberal (sekuler) yang memisahkan agama dan negara. Tokoh intelektualnya yang paling terkemuka dalam masalah ini adalah Syaikh Ali Abd ar-Raziq. Raziq berpandangan bahwa Islam adalah agama sebagaimana dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan masalah kenegaraan.<sup>4)</sup>

Berbeda dengan negara-negara di atas adalah Indonesia dan Maroko yang malu-malu untuk menyatakan diri sebagai negara Islam maupun negara sekuler. Keduanya adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim dan pernah menjadi jajahan bangsa Eropa, yang satu bekas jajahan Belanda dan yang lain jajahan Perancis. Pengaruh Eropa (Belanda dan Perancis) cukup meninggalkan bekas di kedua negara itu terutama budaya dan sistem pemerintahannya. Begitupun dengan demokrasi yang muncul di belahan bumi Eropa itu. Demokrasi menjadi “barang laku” di berbagai negara, meskipun kelahirannya tidak sekaligus membawa suatu bangsa menjadi lebih baik.

Di Indonesia demokrasi telah menjadi pilihan sistem kenegaraannya, meskipun dengan modifikasi lain dan beberapa catatan. Polemik tersebut dimulai

---

<sup>3)</sup> Kaum Kemalis (para pendukung gagasan Mustafa Kemal), mengatakan terhadap lembaga-lembaga Islam, bahwa bagi pihaknya masalahnya bukan lagi menemukan cara untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga Islam, melainkan institusi-institusi Islam harus dihancurkan. Lihat Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, alih bahasa Karsidi Diningrat, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 61.

<sup>4)</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi ke-5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1-3.

oleh Sukarno<sup>5)</sup> yang menulis artikel “Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara?”.<sup>6)</sup> Artikel itu menunjukkan keberpihakannya terhadap gagasan sekuler yang di gencarkan Mustafa Kemal dan Ali Abd ar-Raziq. Tulisan tersebut direspon oleh banyak tokoh politik Islam saat itu, seperti H. Agus salim, H.O.S. Cokroaminoto dan Muhammad Natsir.<sup>7)</sup> Natsir sejalan dengan pandangan para reformis Muslim lainnya berkeyakinan bahwa Islam adalah ajaran-ajaran yang meliputi kaidah-kaidah muamalah (hubungan manusia dengan sesamanya) dan ibadah khusus (hubungan dengan Tuhan). Negara dalam pendapat Natsir hanyalah merupakan alat untuk merealisasikan syari’at Islam dan bukan merupakan tujuan.<sup>8)</sup>

Oleh karena itu, menurut Natsir, untuk mengatur negara dan masyarakatnya, maka Islam harus menjadi ideologi negara. Ideologi dalam pengertiannya bukan hanya suatu rangkaian pikiran atau ide-ide, tetapi ia merupakan suatu perpaduan antara ide dan aliran perasaan dan gelombang-gelombang tertentu.<sup>9)</sup> Berangkat dari pandangannya itu bahwa agama dan negara harus bersatu, secara rinci prosedural, ia memilih demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang mempunyai nilai-nilai yang hampir sama dengan Islam. Karenanya, dia mengusulkan bagi bentuk negara dan

---

<sup>5)</sup> Soekarno adalah presiden Republik Indonesia yang pertama. Ia dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Dalam pemikiran kenegaraannya ia cenderung sekuler dan lebih condong kepada ajaran wayang dari tradisi Hindu-Jawa yang feodalistik.

<sup>6)</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Sukarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 5-6.

<sup>7)</sup> Selanjutnya, Muhammad Natsir ditulis Natsir dalam penyusunan skripsi ini.

<sup>8)</sup> Muhammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 83.

<sup>9)</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

sistem pemerintahan Indonesia adalah “Negara Demokrasi Berdasarkan Islam”.<sup>10)</sup> Dalam salah satu kesempatan Natsir pernah mengemukakan bahwa sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam hanya mungkin berhasil jika dalam suatu sistem yang demokratis.<sup>11)</sup> Natsir adalah seorang demokrat. Ia bersikap kritis dan tidak senang dengan tindakan politik diktatorial. Perjalanan politiknya sebagai seorang politikus dan negarawan, terutama ketika menjadi perdana menteri (1950-1951), telah membuktikan hal tersebut.<sup>12)</sup> Dengan pemikiran dan perjuangannya itu, dapat dikatakan bahwa Natsir adalah seorang nasionalis religius (Islami).<sup>13)</sup>

Negara yang hampir sama dengan Indonesia adalah Maroko, yang merdeka tahun 1965. Di sana demokrasi masih menjadi perdebatan serius sampai saat ini. Tokoh kontemporer yang namanya cukup dikenal adalah Muhammad ‘Abid al-Jabiri,<sup>14)</sup> seorang intelektual Muslim asal negeri itu yang sedang gigih berjuang dalam proyek besarnya “Kritik Nalar Arab”. Ia ingin membangkitkan birahi intelektual Arab dengan menelurkan gagasan-gagasan segarnya. Al-Jabiri berbeda dengan Natsir. Menurutnya, bahwa pertanyaan “apakah Islam agama atau negara?” tidak ada padanan maknanya dalam Islam, karena memisahkan agama dari negara

---

<sup>10)</sup> *Ibid.*, hlm. 200.

<sup>11)</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik...*, hlm. 128.

<sup>12)</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai sepak terjang dan tindakan politik Natsir tercermin dalam program kerja kabinetnya selama ia menjadi perdana menteri. Lihat Pepora 3: *Membangun di antara Tumpukan Puing dan Pertumbuhan*, keterangan pemerintah diucapkan oleh perdana menteri Muhammad Natsir pada sidang DPRS di Jakarta 10 Oktober 1950.

<sup>13)</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik...*, hlm. 1.

<sup>14)</sup> Untuk selanjutnya Muhammad Abid al-Jabiri di tulis al-Jabiri dalam penyusunan skripsi ini.

sama sekali tidak sejalan dengan kerangka rujukan pemikiran Islam.<sup>15)</sup> Artinya tema agama dan negara tidak pernah terlontar di zaman Nabi dan *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Ia tidak dengan gampang pula mengatakan bahwa konsep *syûrâ* dalam tradisi Islam adalah sama dengan demokrasi. Menurut pandangan semacam itu a-historis, sebab *syûrâ* pada mulanya hanyalah berarti konsultasi yang tidak mengikat sang pemimpin untuk melakukan hasil konsultasi tersebut.<sup>16)</sup> Hal ini tentu berbeda dengan demokrasi yang menganggap bahwa keputusan wakil rakyat bersifat mengikat.<sup>17)</sup> Persoalan ini sangat ditentukan oleh sikap dan pembacaan kita terhadap tradisi.

Ia menggunakan tiga kerangka konseptual dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan hadits, yaitu yang dipikirkan (*al-mufakkar fih*), yang tak terpikirkan (*allâ mufakkar fih*), dan yang terbuka untuk dipikirkan (*qâbil li at-tafkîr fih*). Dalam konsep *syûrâ* misalnya, apa yang dipikirkan dalam konsep itu pada mulanya adalah konsultasi yang tidak mengikat, sedangkan model demokrasi melalui pemilihan umum merupakan sesuatu yang tak terpikirkan di kala itu. Namun di sisi lain, konsep *syûrâ* itu terbuka untuk dipikirkan, yakni dapat dikembangkan penafsirannya menjadi konsep demokrasi dalam pengertian sekarang, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.<sup>18)</sup> Karenanya, ia juga mendekonstruksi konsep demokrasi yang telah ada dengan mengatakan bahwa definisi demokrasi sebagai

---

<sup>15)</sup> Muhammad 'Abid al-Jâbirî, *Ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq as-Syari'ah*, (Beirût: Markaz al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1994), hlm. 62-63.

<sup>16)</sup> Al-Jâbirî, *Ad-Dimuqrâtiyyah wa Huqûq al-Insân*, (Beirût: Markaz al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1994), hlm. 42.

<sup>17)</sup> Mujiburrahman, "Pengantar Penerjemah" untuk Muhammad Abid al-Jabiri, *Syura: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. x.

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hlm.xii.

pemerintahan rakyat atas dirinya sendiri merupakan definisi yang tidak mungkin dapat diterapkan. Al-Jabiri meyakini bahwa demokrasi akan bisa menyelesaikan persoalan krisis di negara-negara Arab, sehingga ia menginginkan adanya persatuan bangsa-bangsa Arab.<sup>19)</sup> Persatuan bangsa-bangsa Arab bukan dalam artian harus adanya satu kepemimpinan untuk seluruh negara, melainkan adanya kepentingan yang sama dalam rangka keluar dari berbagai kungkungan krisis dan tirani kapitalisme dan untuk mensejahterakan rakyat. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai seorang nasionalis Arab.<sup>20)</sup>

Natsir dan al-Jabiri adalah sosok pemikir Muslim yang memperjuangkan demokrasi dan nilai yang dikandungnya, agar tercapai sebuah masyarakat yang berkeadilan. Dari sisi ini sepertinya pemikiran politik Natsir dan al-Jabiri hampir sama, namun waktu, kondisi, dan *background* pendidikan yang berbeda akan berimplikasi lain ketika mereka membangun konsepnya. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti pemikiran kedua tokoh tersebut.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain:

1. Bagaimana konsepsi Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri tentang demokrasi.

---

<sup>19)</sup> Persatuan Bangsa-Bangsa Arab yang dimaksud al-Jabiri setidaknya lembaga yang selevel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini. Lihat *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>20)</sup> Ahmad Baso, "Kata Pengantar" untuk Muhammad Abid al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam*, hlm. IX.

2. Apa yang melatarbelakangi Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri dalam membangun konsepnya.
3. Apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.
4. Bagaimana tipologi dan pengaruh pemikiran keduanya terhadap pemikiran politik Islam di Indonesia.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan pemikiran Muhammad Natsir dan Muhammad Abid al-Jabiri tentang demokrasi
2. Mencari faktor yang melatarbelakangi pemikiran Muhammad Natsir dan Muhammad 'Abid al-Jabiri tentang demokrasi
3. Mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut
4. Mencari tipologi dan pengaruh pemikiran keduanya dalam konteks pemikiran politik Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran politik Islam.
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian politik Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual Muslim tentang demokrasi.

#### D. Telaah Pustaka

Diskursus demokrasi merupakan hal yang sudah sejak lama diganderungi oleh para pemikir politik -baik dalam maupun luar negeri- karenanya yang menulis demokrasi baik secara konseptual, sejarah, maupun empiris dengan pendekatan sosiologis relatif banyak. Akan tetapi, karya tulis tentang demokrasi yang dikaitkan dengan Natsir dan al-Jabiri, sejauh pengamatan kami, belum ditemukan. Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas Natsir mengenai pandangan politiknya baik secara tersendiri maupun dikomparasikan dengan tokoh lain, di antaranya: Yusril Ihza Mahendra, dalam disertasi doktoralnya menulis *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Jamaat-i Islami (Pakistan)*.<sup>21)</sup> Pembahasan buku ini lebih menekankan pada gerakan kedua partai tersebut, Masyumi dan *Jamaat-i Islami* ideologi dan garis perjuangannya serta langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua partai yang masing-masing dimotori oleh Natsir (modernis) dan al-Maududi (fundamentalis).

Demikian pula buku, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*<sup>22)</sup> yang ditulis oleh Kamaruzzaman Bustaman. Buku ini menempatkan Natsir sebagai modernis dan al-Maududi sebagai fundamentalis, dan pembahasannya lebih menekankan kepada pemetaan aliran atau tipologi pemikirannya. Disamping itu, ada pula buku *Polemik Negara Islam: Soekarno*

---

<sup>21)</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Jamaat-i Islami (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>22)</sup> Kamaruzzaman Bustaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesiatera, 2001).

*Versus Natsir*,<sup>23)</sup> yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi. Ia mengeksplorasi pandangan-pandangan politik Muhammad Natsir (nasionalis religius) yang kemudian di benturkan dengan Sukarno (nasionalis sekuler) terutama konsep pendasaran negara Indonesia terhadap agama (Islam).

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: *Pemikiran Muhammad Natsir tentang Negara (Telaah Negara Berdasarkan Ideologi Islam)*,<sup>24)</sup> membahas dengan cukup singkat dan global pemikiran Natsir tentang negara. Lalu *Muhammad Natsir dan Gagasannya tentang Ideologi Negara Islam*,<sup>25)</sup> dan *Gagasan Tentang Islam sebagai Dasar Negara dalam Majelis Konstituante: Studi Perjuangan Politik Muhammad Natsir 1957-1959*,<sup>26)</sup> pembahasan keduanya hanya terbatas pada persoalan ideologinya saja. Sedangkan perjuangan Natsir dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui sidang-sidang di parlemen dibahas dalam *Mosi Integral Natsir dalam Pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia*.<sup>27)</sup> Semua skripsi tersebut tidak membahas Natsir pada wilayah konsep demokrasiya dan cenderung monoton.

---

<sup>23)</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002)

<sup>24)</sup> Fauzan Rofiqun, *Pemikiran Muhammad Natsir tentang Negara (Telaah Negara Berdasarkan Ideologi Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

<sup>25)</sup> Ummu Salamah, *Muhammad Natsir dan Gagasannya tentang Ideologi Negara Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1995).

<sup>26)</sup> Zaenal Arifin, *Gagasan Tentang Islam sebagai Dasar Negara dalam Majelis Konstituante: Studi Perjuangan Politik Muhammad Natsir 1957-1959*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>27)</sup> Ahmad Bawaki, *Mosi Integral Natsir dalam Pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

Sementara itu, yang menulis tentang al-Jabiri dalam bentuk artikel, yaitu A. Luthfi Assyaukanie, *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer* menempatkan al-Jabiri sebagai garda depan tipologi reformistik bersama-sama Muhammad Arkoun yang cenderung menggunakan metode dekonstruktif. Kemudian Syafiq Hasyim menulis “Islam Berangkat dari Nalar Arab”<sup>28)</sup> dan Ahmad Baso menulis “Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Muhammad Abid al-Jabiri,”<sup>29)</sup> yang keduanya dimuat dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*. Sedangkan dalam bentuk skripsi, baru ada satu yang kami temukan, yaitu Imam Khoiri, *Tradisi dan Modernitas Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (Studi Kritik Nalar Hukum Islam)*<sup>30)</sup> yang cukup dalam membahas seputar tradisi dan modernitas dalam pandangan al-Jabiri, namun tidak menyinggung sama sekali kritik nalar politiknya apalagi konsep demokrasinya.

### E. Kerangka Teoretik

Menurut Miriam Budiarjo negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut para warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang syah.<sup>31)</sup> Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni

---

<sup>28)</sup> Syafiq Hasyim, “Islam Berangkat dari Nalar Arab”, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 2 (1998), hlm. 86-94.

<sup>29)</sup> Ahmad Baso, “Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Muhammad Abid al-Jabiri,” dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 4, (1999), hlm. 29-39.

<sup>30)</sup> Imam Khoiri, *Tradisi dan Modernitas Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (Studi Kritik Nalar Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002)

<sup>31)</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 40.

pejabat dan rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan -secara cukup menonjol- kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.<sup>32)</sup> Sistem politik yang diyakini dapat membawa negara dan rakyatnya kepada keadaan yang lebih baik adalah demokrasi.<sup>33)</sup>

Adapun agama didefinisikan Mahmud Syaltut sebagai ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.<sup>34)</sup> Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (*the secret*) dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-kelompok.<sup>35)</sup> Jadi, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.<sup>36)</sup>

---

<sup>32)</sup> Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 4.

<sup>33)</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa A.Rahman Zaenudin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 53.

<sup>34)</sup> Sementara itu Syaikh Muhammad Abdullah Badran mendefinisikannya secara kebahasaan. *Dîn* yang biasanya diterjemahkan “agama”, menurut Guru Besar Al-Azhar itu, menggambarkan hubungan antara dua pihak di mana yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi agama adalah hubungan makhluk dan *Khaliq*-nya yang mewujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 209-210.

<sup>35)</sup> Dikutip oleh Dawam Raharjo, “Agama, Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 13.

<sup>36)</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. i

Oleh Karena itu, kemunculan ungkapan *al-islâm dîn wa daulah* (Islam adalah agama dan negara) yang mengisyaratkan kekuatan agama dan negara adalah hal yang wajar, meski bersifat problematis. Dalam upaya menjawab masalah ini beberapa pengamat politik Islam cenderung untuk melihatnya secara “monolitik”, karena tunduk kepada sebuah paradigma bahwa hubungan antara Islam dan politik pada hakikatnya bersifat “organik”. Akhirnya, mereka memandang Islam sebagai sesuatu yang sejak awalnya merupakan agama politik.<sup>37)</sup> Kelemahan paradigma ini adalah tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi-interpretatif, yang membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenai (a *polyinterpretable religion*). Oleh karena itu, politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif semacam ini.<sup>38)</sup>

Ketika agama dihubungkan dengan demokrasi telah memunculkan beberapa kecenderungan. Secara garis besar hubungan agama dan demokrasi bisa dibedakan menjadi tiga model. *Pertama* model negatif, yaitu agama bertentangan dengan demokrasi. Sebagian ulama dan penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat yang layak bagi demokrasi. Secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan berada dalam genggaman rakyat. Sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanyalah Tuhan yang memiliki kekuasaan.<sup>39)</sup>

---

<sup>37)</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 4.

<sup>38)</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>39)</sup> Komaruddin Hidayat, “Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi”, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 189-192.

Model *kedua* hubungan agama dan demokrasi adalah bersifat netral, dimana urusan agama dan urusan politik berjalan sendiri-sendiri. Teori pemisahan agama dan politik ini populer dengan istilah sekularisasi politik.<sup>40)</sup> Berlawanan dengan model pertama dan kedua, yang *ketiga* bersifat positif, yakni berpandangan bahwa agama, baik secara sosiologis maupun teologis, sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Meskipun agama tidak secara sistemis mengajarkan praktik demokrasi, namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.<sup>41)</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah atau *siyâsah syar'iyah*, apapun peraturan, perundang-undangan dan sistem kenegaraan yang sesuai dengan dasar ajaran agama harus membawa kepada kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akherat, karena Islam datang sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya.<sup>42)</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain: 1) keselamatan agama (*al-muhâfazah 'ala ad-dîn*), 2) keselamatan jiwa (*al-muhâfazah 'ala an-nafs*), 3) keselamatan akal (*al-muhâfazah 'ala al-'aql*), 4) keselamatan keluarga dan

---

<sup>40)</sup> *Ibid.*, hlm. 192-193. Teori ini ternyata memiliki banyak nuansa. Sekularisasi bisa berlangsung hanya pada level formal kelembagaan, bisa terjadi pada proses sosial, dan bisa juga pada level kesadaran metafisis. Dan bisa jadi ketiganya berlangsung sekaligus.

<sup>41)</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196. Dalam Islam, misalnya, sejak Muhammad Rasulullah memulai dakwahnya berupa *tauhid* (tidak ada objek pujaan yang diidolakan kecuali Allah), maka implikasi sosiologis dari ajaran *tauhid* ini adalah munculnya gerakan egalitarianisme, dalam masyarakat Arab yang feodalistik. Meskipun agama itu berasal dari Tuhan, kata pendukung ini, tetapi pada pelaksanaannya melibatkan manusia.

<sup>42)</sup> Al-Anbiya' (21): 107.

keturunan (*al-muhâfazah 'ala an-nasl*), dan 5) keselamatan harta benda (*al-muhâfazah 'ala al-mâl*).<sup>43)</sup>

Di samping itu, dalam penelitian yang diproyeksikan kepada seorang tokoh, menurut A. Luthfi Assyaukanie, Sejauh yang menyangkut pandangan-pandangan para pemikir Arab (Islam) kontemporer tentang tradisi dan modernitas atau antara doktrin agama dengan politik, secara umum ada 3 tipologi pemikiran yang mewarnai wacana pemikiran Arab kontemporer. Tipologi tersebut antara lain: 1) tipologi transformatik, 2) tipologi reformistik, dan 3) tipologi ideal-totalistik. Adapun maksud tipologi pertama adalah gerakan pembaruan pemikiran Islam yang menganjurkan dilakukannya proses transformasi masyarakat Muslim Arab dari budaya tradisional patriarkal ke budaya rasional dan ilmiah. Mereka menolak cara pandang agama dan kecendeungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis serta menganggap agama dan tradisi adalah masa lalu yang tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman sekarang sehingga harus ditinggalkan.

Tipologi yang kedua adalah tipologi reformistik.<sup>44)</sup> Pada kelompok ini proyek yang hendak digarap adalah reformasi dengan cara melakukan penafsiran-penafsiran baru (*reinterpretasi*), yang lebih hidup dan lebih cocok dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Kelompok ini lebih spesifik lagi dibagi kepada dua kecenderungan: pertama, para pemikir yang memakai metode pendekatan

---

<sup>43)</sup> Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., Cet. V, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 424-426, lihat pula Ali Hasbullah, *Uşul at-Tasyri' al-Islâmi*, Cet. III, (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1964), hlm. 260.

<sup>44)</sup> Gerakan reformistik adalah proses evolusi madrasah Abduh yang beraliran kiri. Pada mulanya Abduh, kemudian Qasim Amin, kemudian Ali Abdul Raziq, kemudian Imarah dan terakhir Hassan Hanafi. Semakin kemari semakin mengiri, dan semakin jauh dari kerangka berpikir sang imam. Kasusnya sama dengan kelompok kanan semakin kemari semakin menjadi radikal (perhatikan mata rantainya: dari Abduh, kemudian Rasyid Ridha, kemudian Hassan al-Banna, dan terakhir Sayyid Quthb).

rekonstruktif, yaitu, melihat tradisi dengan pespektif pembangunan kembali. Maksudnya agar tradisi suatu masyarakat (agama) tetap hidup dan bisa terus diterima, maka ia harus dibangun kembali secara baru (*i'âdah bunyat min jadid*) dengan kerangka modern dan prasyarat rasional.

Kecenderungan kedua dari tipologi reformistik ini adalah penggunaan metode dekonstruktif. Metode dekonstruksi merupakan fenomena baru buat pemikiran Arab kontemporer. Para pemikir dekonstruktif terdiri dari para pemikir yang dipengaruhi oleh gerakan (post)-strukturalis Perancis dan beberapa tokoh post-modernisme lainnya seperti Levi-Strauss, Lacan, Barthes, Foucolt, Derrida dan Gadamer. Pemikir garda depan kelompok ini adalah Muhammad Arkoun dan Muhammad 'Abid al-Jabiri.<sup>45)</sup>

Kelompok ketiga adalah tipologi pemikiran ideal-totalistik. Ciri utama dari tipologi ini adalah sikap dan pandangan idealis terhadap ajaran Islam yang bersifat totalistik. Kelompok ini sangat *committed* dengan aspek religius budaya Islam. Proyek peradaban yang hendak mereka garap adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Mereka menolak unsur-unsur asing yang datang dari Barat, karena Islam sendiri sudah cukup mencakup tatanan sosial, politik dan ekonomi.<sup>46)</sup> Ketiga tipologi ini telah meramaikan wacana pemikiran Arab kontemporer. Meskipun kategori tipologi semacam ini tidak sepenuhnya mempunyai batasan yang *clear-cut*, tapi secara umum substansi setiap ide para pemikir Arab dapat dijelaskan melalui salah satu tipologi tersebut.

---

<sup>45)</sup> A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 1, (Juli-Desember 1998), hlm. 63-65.

<sup>46)</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

Dikarenakan kajian ini meneliti pemikiran seseorang dan sudah barang tentu dalam waktu yang sudah lampau, maka penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap pemikiran mereka. Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek: a) bagaimana deskripsi peristiwanya, b) mengapa peristiwa itu terjadi, dan c) ke mana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.<sup>47)</sup>

Dalam perkembangan penulisan sejarah muncul sejarah deskriptif-analitis. Menurut Sartono Kartodirdjo, penulisan sejarah yang deskriptif-analitis ini berusaha menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa.<sup>48)</sup> Dalam sejarah analitis digunakan metode kritis dan konsep-konsep serta teori-teori ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai alat interpretasi terhadap fenomena sejarah, termasuk ilmu-ilmu sosial.<sup>49)</sup> Ilmu sosial tersebut antara lain adalah sosiologi. Pra-anggapan perspektif sosiologis adalah *concern*-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.<sup>50)</sup>

---

<sup>47)</sup> Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

<sup>48)</sup> Dikutip dari Ahmad Adaby Darban, *Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional*, makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985, yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, hlm. 1-2.

<sup>49)</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>50)</sup> Michael S. Northcott, "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 267.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>51)</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.<sup>52)</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain: *Capita Selecta*,<sup>53)</sup> *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*,<sup>54)</sup> *Membangun di antara Tumpukan Puing dan Pertumbuhan*,<sup>55)</sup> *Ad-Dimuqrâṭiyyah wa Huqûq al-Insân*,<sup>56)</sup> *Ad-Dîn wa ad-Daulah wa Tathbîq as-Syari'ah*,<sup>57)</sup> *Naqd al-'Aql al-'Arabî (1): Takwin al-*

<sup>51)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>52)</sup> Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. . 47-59.

<sup>53)</sup> Muhammad Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

<sup>54)</sup> Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001).

<sup>55)</sup> Natsir, *Membangun di antara Tumpukan Puing dan Pertumbuhan*, (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1951).

<sup>56)</sup> Muhammad 'Abid al-Jâbirî, *Ad-Dimuqrâṭiyyah wa Huqûq al-Insân*, (Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyah, 1994).

<sup>57)</sup> Al-Jâbirî, *Ad-Dîn wa ad-Daulah wa Tathbîq as-Syari'ah*, (Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyah, 1994).

*Aql al-'Arabî*,<sup>58)</sup> *Naqd al-'Aql al-'Arabî (2): Bunyah al-'Aql al-'Arabî*,<sup>59)</sup> *Nahnu wa at-Turas: Qirâ'ât Mu'âsirah fi Turâsinâ al-Falsafî*,<sup>60)</sup> dan tulisan-tulisan lain yang dimuat di beberapa media sebagai hasil karyanya sendiri. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) adalah kajian-kajian yang membahas tentang demokrasi, dan yang membahas kedua tokoh tersebut.

### 3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.<sup>61)</sup>

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.<sup>62)</sup> Metode sosio-historis dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan, agama atau kejadian

<sup>58)</sup> Al-Jâbirî, *Naqd al-'Aql al-'Arabî (1): Takwin al-'Aql al-'Arabî*, Cet.V, (Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1991).

<sup>59)</sup> Al-Jâbirî, *Naqd al-'Aql al-'Arabî (2): Bunyah al-'Aql al-'Arabî, Dirâsah Tahliliyah, Naqdiyyah li Nuzûm al-Ma'rifah, fi al-Šaqafah al-'Arabiyyah*, Cet. IV, (Beirût: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1992).

<sup>60)</sup> Al-Jâbirî, *Nahnu wa at-Turas: Qirâ'ât Mu'âsirah fi Turâsinâ al-Falsafî*, (Casablanca: al-Markaz as-Šaqâfi al-'Arabî, 1986)

<sup>61)</sup> Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada *evidensi* objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif. Dengan instrumen di atas, diuraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut terlebih dahulu, lalu dicari metode pendekatan dan substansi pemikirannya. Lihat Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43.

<sup>62)</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan di mana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.<sup>63)</sup>

Di samping itu, pendekatan hermeneutik juga mewarnai penelitian ini. Dengan pendekatan hermeneutik diharapkan dapat memberi makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap fakta-fakta sosio-historis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lampau sesuai dengan konteksnya.<sup>64)</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulिसannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: *bab pertama* pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian *bab dua* mengeksplorasi pengertian, sejarah dan perkembangan demokrasi, sejarah perpolitikan Islam, dan respon intelektual Islam

<sup>63)</sup> Dalam dunia pengetahuan tentang Islam sebenarnya benih metode sosio-historis itu telah ada berupa pengikutsertaan pengetahuan *asbâb an-nuzûl* untuk memahami al-Qur'an dan *asbâb al-wurûd* untuk memahami *as-Sunnah*. Cuma saja *asbâb al-nuzûl* dan *asbâb al-wurûd* itu hanya terbatas pada peristiwa dan pertanyaan yang mendahului turunnya wahyu (*nuzûl*) dan disampaikannya (*wurûd*) *as-Sunnah*. Dari itu metode sosio-historis dapat dikatakan sebagai abstraksi dari teori *asbâb al-nuzûl* dan *asbâb al-wurûd*. Lihat Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem)", dalam *al-Jami'ah*, No.31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 23-36.

<sup>64)</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.12-15. Kata *hermeneutik* merupakan derivasi dari kata *hermes* dalam mitologi Yunani. Secara teologis peran Hermes tak ubahnya seperti peran para nabi utusan Tuhan yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung untuk menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia. Problem pertama yang harus dipecahkan para nabi adalah bagaimana menyampaikan kehendak Tuhan yang menggunakan "bahasa langit" kepada manusia yang menggunakan "bahasa bumi". Problem hermeneutik yang kedua adalah bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang berbeda dari pihak penulisnya.

terhadap demokrasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang demokrasi dan tradisi politik Islam yang biasanya dijadikan landasan dalam perdebatan pemikiran politik Islam. Lalu sketsa biografi, kondisi sosial, latar belakang keluarga dan pendidikan serta pemikiran Natsir dan al-Jabiri disuguhkan pada *bab tiga*.

Selanjutnya pada *bab empat*, penyusun menganalisis dan membandingkan antara pemikiran Natsir dan al-Jabiri mengenai pandangannya terhadap demokrasi, metode pendekatan yang digunakan, substansi pemikiran, dasar-dasar argumentasi dan tipologi pemikiran keduanya. Sedangkan *bab lima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian komprehensif, banyak hal yang telah penulis temukan dan dapat diambil manfaatnya. Berbagai hal yang sebelumnya tidak jelas (*ambiguous*) tidak tersentuh (*untouchable*) dan tak terpikirkan (*unthinkable*) terutama dalam realitas pribadi penulis, telah bergeser menjadi lahap wacana yang elegan, menggelitik dan bahkan menggairahkan dalam horizon pemikiran penulis. Kajian ini bukanlah sesuatu yang sudah berakhir (*final step*) pada tataran wacana, melainkan sebagai suatu langkah awal dan sebagai pemanasan bagi kajian yang lebih mendalam dan komprehensif lainnya. Namun demikian, kajian ini mesti diakhiri sebagai bentuk kegiatan terencana dalam suatu penelitian.

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang senantiasa berpijak pada pokok masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Demokrasi menurut Natsir tidak boleh lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu Natsir mengatakan bahwa Islam itu menganut paham *theistic democracy*, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Keputusan mayoritas rakyat yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan, menurut Natsir, dapat dianggap sebagai *ijma'* kaum Muslimin yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu. Sedangkan menurut al-Jabiri,

- konsep demokrasi ditentukan oleh dua otoritas yang sepenuhnya berbeda, yakni otoritas tradisi dan otoritas renaissans. Yang pertama membaca demokrasi dalam kerangka *syûrâ* (musyawarah) dalam Islam dan yang kedua membatasi unsur-unsur demokrasi pada perkembangan perjuangan demokrasi di Eropa, perjuangan yang berlangsung lebih dari tiga abad.
2. Faktor-faktor yang melatarbelangi Natsir dan al-Jabiri dalam membangun konsepnya antara lain: faktor pendidikan, guru-guru, aktivitas, kondisi sosio politik, kondisi ekonomi, dan metode pendekatan.
  3. Persamaan dan Perbedaan antara Natsir dan al-Jabiri
    - a. Persamaan
      - 1) Keduanya sama-sama berkecenderungan substansial dalam upaya memberlakukan dan menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam.
      - 2) Keduanya sama-sama menghendaki model pemerintahan demokratis yang mengedepankan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa membedakan agama, ras dan suku bangsa.
      - 3) Keduanya sama-sama berada dalam negara yang tidak stabil secara politik dan ekonomi, dan dalam tekanan kolonialisme. Indonesia dijajah Belanda sedangkan Maroko dijajah Perancis.
      - 4) Keduanya sama-sama dapat dikategorikan sebagai pemikir reformistik. Yaitu meyakini bahwa *turâs* dan modernitas keduanya adalah baik. Karenanya berusaha mengharmonisasikan *turâs* dan modernitas dengan tidak menyalahi akal sehat dan standar rasional.

b. Perbedaan

- 1) Latar belakang pendidikan. Natsir tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang bergerak dalam pembaharuan Islam, sedangkan al-Jabiri tumbuh dalam lingkungan pendidikan milik nasionalis.
- 2) Guru-guru/tokoh-tokoh yang mempengaruhi. Pemikiran Natsir banyak dipengaruhi oleh kaum modernis, sementara al-Jabiri banyak dipengaruhi oleh gerakan post-strukturalisme Perancis.
- 3) Metode pendekatan yang digunakan Natsir adalah rekonstruksi, yang menafsirkan kembali *turâs* agar lebih hidup dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara al-Jabiri menggunakan metode dekonstruksi, yang membongkar struktur bangunan *turâs* dan modernitas.
- 4) Natsir menekankan persatuan agama dan negara, dan mengatakan bahwa demokrasi sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam, sedangkan al-Jabiri mengatakan bahwa agama dan negara bukanlah harus dipisah atau disatukan, akan tetapi memang hal ini tidak pernah dilontarkan pada zaman Nabi dan *al-Khulafâ' ar-Râsyidûn*.
- 5) Natsir membangun konsep demokrasiya atas dasar konsep *ijtihâd*, *syûrâ* dan *ijmâ'*. Konsep *ijtihâd* dan *ijmâ'* jika dihubungkan dengan konsep *syûrâ* yang disebutkan dalam al-Qur'an, menurut Natsir, dapat diwujudkan ke dalam bentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat. Selain itu ia juga melihat bahwa demokrasi sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang

berasaskan kedaulatan rakyat. Sementara al-Jabiri melihat demokrasi atas dasar realitas kontemporer Arab yang menuntut keadilan, tiadanya tirani, dan adanya persamaan.

4. Keduanya termasuk dalam kategori pemikir tipologi reformistik, yaitu yang meyakini bahwa *turâs* dan modernitas kedua-duanya adalah baik. Karenanya berusaha mengharmonisasikan *turâs* dan modernitas dengan tidak menyalahi akal sehat dan standar rasional. Bedanya, Natsir menggunakan metode rekonstruktif sedangkan al-Jabiri menggunakan metode dekonstruktif. Adapun pengaruh pemikirannya, yaitu: pemikiran Natsir lebih berkembang di lingkungan kaum modernis Islam, sementara pemikiran al-Jabiri lebih sering dibahas dalam lingkungan kaum muda Nahdlatul Ulama. Akan tetapi perbedaan pengaruh pemikiran ini kurang relevan dalam dunia akademisi.

## B. Saran-saran

1. Dinamika kajian politik Islam mengalami proses yang amat pesat dalam mengikuti perkembangan zaman dan evolusi pemikiran. Akan tetapi, sistem politik yang di terapkan pada masing-masing negara tersebut, belum bisa membawa rakyatnya kepada taraf yang diinginkan, sejahtera lahir dan batin yang didasarkan atas prinsip keadilan. Sebagai agama, Islam kaya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sebagai peradaban, Islam juga kaya akan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Dengan mengkaji Islam secara lebih mendalam diharapkan dapat menemukan suatu sistem yang sesuai dengan tuntutan realitas

masyarakat saat ini. Dan demokrasi adalah sistem yang pernah ditemukan umat manusia yang diharapkan dapat menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran yang sampai saat ini belum ditemukan sistem yang lebih unggul darinya. Penelitian ini adalah satu titik dalam pemikiran politik Islam. Untuk menindaklanjuti hal itu, perlu digalakan berbagai penelitian yang berorientasi terutama pada aspek metodologis dalam kajian Islam dan politik. Tentunya dengan tidak membajak hasil karya orang lain.

2. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam mendapatkan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik kajian ini, meskipun topik yang diangkat bersifat universal dan merupakan isu global serta tokoh yang dipilih keduanya adalah tokoh yang sudah dikenal luas dalam dunia pemikiran Islam. Untuk itu, dengan kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak fakultas dan institut untuk menambah literatur-literatur yang dimaksud. Hal ini akan sangat membantu para civitas-akademika dalam mengikuti perkembangan wacana pemikiran Islam. Dengan begitu, akan turut mencerdaskan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1993.
- Abdullah, Amin, "Al-Ta'wil al-'Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci, dalam *Al-Jami'ah*, Vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2001.
- Natsir, M., *Bertentangkah Pancasila dengan A-Qur'an*, Jakarta: Hikmah, Mei 1954.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002.

### B. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Afandi, Arif (ed.), *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur dan Amin Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- el-Affendi, Abdelwahab, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam*, alih bahasa Nuruddin Arraniri, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ahmad, Mumtaz (ed.), *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa: Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Amirudin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Baso, Ahmad, "Pengantar Penerjemah: Posmodernisme Sebagai Kritik Islam, Kontribusi Metodologis "Kritik Nalar" Muhammad Abid Al-Jabiri, dalam Muhammad abid Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

- , "Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Muhammad Abid al-Jabiri," dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 4, 1999.
- Bawaki, Ahmad, *Mosi Integral Natsir dalam Pembentukan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Bustaman, Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001
- Efendi, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- , *Teologi Baru Politik Islam*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Engeneer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Haikal, M. Hussein, *Al-Hukûmah al-Islâmiyah*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, tt.
- Haikal, Muhammad Hussein, *Pemerintahan Islam*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hasaballah, Ali, *Uşûl at-Tasyri' al-Islamî*, Cet. III, Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1964.
- Hasbi, Artani, *Musyawah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Utama, 2001.
- Hasyim, Syafiq, "Islam Berangkat dari Nalar Arab", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, No. 2, 1998.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Suatu Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hidayat, Komaruddin, "Tiga model Hubungan Agama dan Demokrasi", dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Ekonomi dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani, Isu-Isu Besar Politik Islam*, alih bahasa M. Abdul Ghafar E.M., Bandung: Mizan, 1996.
- al-Jâbirî, Muhammad 'Abid, *Ad-Dimuqrâtiyyah wa Huqûq al-Insân*, Beirut: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1994.

- , *Ad-Dîn wa ad-Daulah wa Tathbîq asy-Syari'ah*, Beirut: Markaz Dirâsât al-Wîndah al-'Arabîyyah, 1994.
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Khoiri, Imam, *Tradisi dan Modernitas Menurut Muhammad Abid al-Jabiri (Studi Kritik Nalar Hukum Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- , *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Jamaat-i Islami (Pakistan)*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- , "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik M. Natsir", dalam *Islamika Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, No. 3, Januari-Maret, 1994.
- , "Muhammad Natsir dan Sayid Abul A'la al-Maududi, Telaah tentang Dinamik Islam dan Transformasinya ke dalam Ideologi Sosial dan Politik", dalam Anwar Harjono, dkk., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Masdar, Umarudin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.
- Minhaji, Akh., *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2001.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.
- Natsir, M., *Agama dan Negara dalam perspektif Islam*, Endang Saefudin Anshari (penyunting), Jakarta: Media Da'wah, 2001.

- Nur, Muhammad, "Islam Berbicara tentang Cita-cita Politik Indonesia Baru", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, 2002.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Raharjo, Dawam, "Agama, Islam dan Negara" dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Rais, M. Amien, *Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Idi Subandi Ibrahim (ed.), Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- , *Moralitas Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Dinanika, 1995.
- Rofiqun, Fauzan, *Pemikiran Muhammad Natsir tentang Negara (Telaah Negara Berdasarkan Ideologi Islam)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Shah, M. Aunul Abid et al. (ed.), *Islam Garda Depan*, Bandung: Mizan, 2002.
- Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Edisi V, Jakarta: UI Press, 1993.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam, Sukarno versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Sukoco, M. Jauhari, *Titik Temu Pemikiran M. Natsir terhadap Perkembangan Neomodernisme Politik Islam pada Masa Orde Baru*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Syamsudin, M. Din, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Islam", dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Toprak, Binnaz, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, alih bahasa Karsidi Diningrat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Zahra, Abu (ed.), *Politik Demi Tuhan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk., Cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

### C. Kelompok Buku-Buku Lain

- Abadi, Setiawan, (ed.), *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Abdalla, Ulil Abshar, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Ali, Mukti dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi, (ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- , "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem)", dalam *al-Jami'ah*, No.31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amal, Ichlasul, "Administrator Natsir dalam Episode Sejarah", dalam Anwar Harjono dkk., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Apter, David E., *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arifin, Zaenal, *Gagasan Tentang Islam sebagai Dasar Negara dalam Majelis Konstituante: Studi Perjuangan Politik Muhammad Natsir 1957-1959*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Assyaukanie, A. Luthfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 1998.
- Aziz, M. Imam, dkk. (ed.), *Agama, Demokrasi, dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Bekker, Anton dan Ahmad Haris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. I, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX, Perancis*, 2 Jilid, Jakarta: Gramedia, 1996.
- al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amin Rais tentang Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

## RALAT DAFTAR PUSTAKA

No.	Hlm.	Daftar Pustaka Kelompok Buku-buku Lain yang Seharusnya Ada Pada Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih
1.	173	Nasution, Harun, <i>Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek</i> , 2 Jilid, Jakarta: UI Press, 1985.
2.	173	Nasution, Khoiruddin, "Islam dan Demokrasi", dalam <i>Jurnal Asy-Syir'ah</i> , vol. 3, No. 1, 2002.
3.	174	Rahmat, Jalaluddin, "Islam dan Demokrasi", dalam Frans Magnis-Suseno, dkk., <i>Agama dan Demokrasi</i> , Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.
4.	174	Santoso, Agus Edi (ed.), <i>Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem</i> , Jakarta: Djambatan, 1997.
5.	175	asy-Syawi, Taufiq, <i>Syura Bukan Demokrasi</i> , alih bahasa Jamaludin ZS., Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
6.	175	Taisir, Muhammad, <i>Konsep Kenegaraan dalam Islam Menurut Natsir</i> , skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. XX, Jakarta: Gramedia, 1999.
- , (ed.), *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Gramedia, 1975.
- , *Partisipasi dan Parpol*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, alih bahasa F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Dahl, Robert A., *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- , *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, alih bahasa A. Rahman Zaenudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- , *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, aiih bahasa A.Rahman Zaenudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Darban, Ahmad Adaby, *Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk Sejarah Nasional*, makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985, yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Djaini, Abidullah, "Pengantar" dalam Anwar Harjono dkk., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Esposito, John L. dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim, Problem dan Prospek*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- , *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, 6 Jilid. Bandung Mizan, 2001.
- Gani, Soelistyawati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta.: Andi Offset, 1990.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, A. Setiawan Abadi, (ed.), Cet. 2, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2001.
- Huntington, Samuel P., "Demokrasi Amerika dalam Kaitannya dengan Asia", dalam Roberth Bartely dkk., *Demokrasi dan Kapitalisme, Perspektif Asia dan Amerika*, alih bahasa Hendro Prasetyo, Jakarta: Cides, 1994.
- al-Jâbirî, Muhammad 'Abid, *Naqd al-'Aql al-'Arabi (I) Takwîn al-'Aql al-'Arabi*, Cet. V, Beirut: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyah, 1991.

- , *Naqd al-'Aql al-'Arabi (2) Bunyah al-'Aql al-'Arabi* Cet. IV, Beirut: Markaz Dirâsât al-Wihdah al-'Arabiyah, 1992.
- , *At-Turâs wa al-Hadaâsah: Dirâsah wa Munâqosyah*, Beirut: Al-Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 1991.
- , *Post-Tradisionalisme Islam*, alih bahasa Ahmad Baso, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Jhones, Peter, "Persamaan Politik dan Kekuasaan Mayoritas", dalam David Miller dan Lary Siedentop, *Politik dalam Perspektif Pemikiran Filsafat dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press tth.
- Kuntowijoyo, *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, Yogyakarta: Bentang, 1994.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, bagian ketiga, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lubis, Muchtar, (ed.), *Demokrasi Klasik dan Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Luth, Thohir, *M. Natsir, Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Madjid, Nurcholish, "Demokrasi Dinamis" dalam Tekad, edisi Th.I, No.2, 9-16 November 1998.
- , "Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia, Beberapa Pandangan Dasar dan Prospek Pelaksanaannya sebagai Kelanjutan Logis Pembangunan Nasional", dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- , "Kebebasan Nurani (Freedom of Conscience) dan Kemanusiaan Universal sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan", dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Paramadina, 1994,
- , "Pendahuluan" dalam Anwar Harjono dkk., *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Mansfield, Peter, *The Arabs*, New York: Penguin Books, 1990.
- M.D., Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Miller, David dan Lary Siedentop, *Politik dalam Perspektif Pemikiran Filsafat dan Teori*, Jakarta: Rajawali Press tth.
- Mudhofir, Ali, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Mujiburrahman, "Pengantar Penerjemah: Memadukan Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun", dalam al-Jabiri, *Syura: Tradisi, Partikularitas, Universalitas*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, penelaah dan pengoreksi KH. Ali Maksum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, Cet. XXV, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, 2 Jilid, Jakarta: UI press, 1985.
- Nasution, Harun et.al., *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal Asy-syir'ah*, vol. 3, No. 1, 2002.
- Natsir, M., *Capita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- , *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah*, Cet. I, Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988.
- , "Memulihkan Kepercayaan terhadap Demokrasi", dalam Herberth Feith dan Lanch Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1988.
- , *Membangun di antara Tumpukan Puing*, Jakarta: Kementrian Penerangan, 1951.
- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, Cet. VII, Jakarta: LP3ES, 1996.
- , *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000.
- , *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cet. III, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

- Northcott, Michael S., "Pendekatan Sosiologis", dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- O'Donnel, Guillermo, dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi, Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, alih bahasa Nurul Agustina, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Panitia 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimejo*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Partanto A. Pius dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Puar, Yusuf Abdullah, *Mohammad Natsir 70 Tahun, Kenang-Kenangan Hidup dan Perjuangan*, Jakarta: Pustaka Antara, 1978.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Cet. IV, Bandung: Pustaka, 2000.
- , *Islam dan Modernitas*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahmat, Jalaluddin, "Islam dan Demokrasi", dalam Frans Magnis-Suseno, dkk., *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.
- Rosidi, Ajip, *M. Natsir Sebuah Biografi*, Cet. 1, Jakarta: Girimukti Pasaka, 1990.
- Rousseau, Jean-Jacques, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Salamah, Ummu, *Muhammad Natsir dan Gagasannya tentang Ideologi Negara Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Santoso, Agus Edi (ed.), *Tidak Ada Negara Islam, Surat-surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Sargent, Lyman Tower, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer, Sebuah Analisis Komparatif*, alih bahasa A.R. Henry Sitanggang, Edisi VI, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Sihbudi, Riza, "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah", dalam M. Imam Aziz dkk. (ed.), *Agama, Demokrasi, dan Keadilan*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Suseno, Franz Magnis, "Demokrasi Tantangan Universal", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- as-Suyûti, Jalâl ad-Dîn, *Târîkh al-Khulafâ'*, Beirut: Dâr as-Şaqafi, 1988.
- Syalabi, Ahmad, *At-Târîkh al-Islâmî wa al-Hadârah Al-Islâmiyah*, Kairo: Maktabah an-Nahdah, tth.
- Syari'ati, Ali, *Islam Agama Protes*, alih bahasa Staria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993.
- asy-Syawi, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, alih bahasa Jamaludin ZS., Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Taisir, Muhammad, *Konsep Kenegaraan dalam Islam Menurut Natsir*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Tamburaka, Rustam E., *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, Cet. II, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Uhlin, Anders, *Oposisi berserak, Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, alih bahasa Rofiq Suhud, Bandung: Mizan, 1999.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, alih bahasa Yohanes Kristiarto dkk., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Watt, W. Montgomery, *Kejayaan Islam, Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, alih bahasa Harsono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Wildan, Dadan, *Yang Da'i Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Zartman, I. William, *Morocco: Problems of New Power*, New York: Atherton Press, 1964.

Lampiran ...

### TERJEMAH AYAT AL-QUR'AN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemah	Ket.
1.	95	103	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.	Al-Jumu'ah (62): 10
2	95	104	Dan dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.	An-Nahl (16): 14
3	96	106	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagian dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.	Al-Qasas (28): 77
4	96	107	Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.	Al-Hasyr (59): 7
5	96	109	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.	Al-Maidah (5): 2
6	96	110	Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan	Al-Hujurat (49): 11

			jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.	
7	97	111	Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu.	Al-Hajj (22): 39
8	97	112	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dri orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.	At-Taubah (9): 34
9	97	113	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah karena itu barang siapa yang ingkar kepada <i>thagut</i> dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul (tali) yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.	Al-Baqarah (2): 256.
10	116	159	Karena rahmat Allah kamu bersikap lunak kepada mereka, sekiranya kamu keras dan kasar niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohon ampunlah bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertawakkallah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakkal.	Ali Imran (3): 159
11	116	160	Mereka itu yang selalu mematuhi ajakan Tuhannya, mendirikan shalat dan persoalan di antara mereka diselesaikan dengan musyawarah, mereka selalu menafkahkan sebagaian rizki yang kami berikan.	Asy-Syura (42): 38

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Asep Zaelani MN
2. Nama Panggilan : Zaelani
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Agustus 1980
6. Alamat:
  - Asal : Kp. Pacing RT 02/ 06, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17540
  - Kost : Jl. Ambarukmo No. 186 Yogyakarta 88251
7. Orang Tua:
  - Nama Ayah : Nalim (Alm.)
  - Nama Ibu : Emur Murnih
8. Latar Belakang Pendidikan:
  - a. SD Negeri Dewi Sartika di Bekasi (1987 - 1993)
  - b. MTs Darul Ulum di Bekasi (1993 - 1996)
  - c. MA Al-Muthohhar di Purwakarta (1996 - 1999)
  - d. IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta (1999 - sekarang)  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
9. Pengalaman Organisasi:
  - a. Korps Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) (1999 - sekarang) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Jabatan:
    - Koordinator Bidang Bank Da'i (2000-2001)
    - Ketua (2001-2002)
  - b. Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI)-Jogjakarta (2002-sekarang)  
Jabatan:
    - Sekretaris Umum (2002-2003)
    - Dewan Penasehat Organisasi (2003-sekarang)

Yogyakarta, 8 Maret 2004

Hormat saya,

Asep Zaelani MN